

## BAB II

# VISI, MISI DAN ARAH PENGEMBANGAN

### 2.1 VISI

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas. kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan rangkaian pentahapan lima tahunan ke 3 dari RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025. Pada tahapan lima tahunan ke 3 ini, rangkaian kebijakan pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kota Mojokerto di segala bidang dengan menekankan kepada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kota Mojokerto sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional makin kelihatan wujudnya dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi. Ketersediaan pusat bisnis dan jaringan ke arah pusat dan hinterlandnya. Ketersediaan dan pasokan energi yang efektif dan efisien dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kesejahteraan masyarakat terus meningkat ditunjukkan dengan makin meningkatnya produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat Kota Mojokerto secara nyata terutama melalui pengembangan usaha kecil menengah dan mikro. Kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga meningkat.

Pengelolaan sumber daya dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang dengan terwujudnya fungsi tata guna lahan. Kesadaran masyarakat makin meningkat sehingga memungkinkan keanekaragaman sumber daya terpelihara dengan baik guna mendukung pembangunan di Kota Mojokerto yang berkelanjutan. Perkembangan ini terjadi juga berkat adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian sumber daya dan lingkungan hidup.

Kualitas sumber daya manusia terus membaik dengan naiknya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan sistem pendidikan yang lebih bermutu, bermakna, dan

kontekstual dengan karakteristik perkotaan yang menonjolkan kemampuan di bidang perdagangan dan jasa, derajat kesehatan juga meningkat karena didukung layanan kesehatan yang makin terjangkau dan merata, serta pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali. Telah berkembang kesadaran menjalankan budaya hidup bersih dan sehat serta berani meninggalkan tradisi dan kebiasaan lama yang merugikan kesehatan.

Sejalan itu ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing terus berkembang. Ketaatan ini berdampak positif kepada toleransi dalam kehidupan beragama antarumat beragama, serta terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal.

Profesionalisme aparatur pemerintahan daerah di Kota Mojokerto meningkat ditandai dengan meningkatnya layanan birokrasi yang murah dan berkualitas. Dalam RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025, target pencapaian RPJM yang ke 3 ini adalah untuk mempersiapkan segala fasilitas, sumberdaya dan kelembagaan yang mampu mewujudkan Kota Mojokerto Metropolitan, yang nyaman dan aman dengan kualitas kehidupan yang baik dan berbudaya.

Sejalan dengan rangkaian kebijakan tersebut, maka Visi Pemerintah Kota Mojokerto lima tahun ke depan dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan perwujudan dari visi yang telah dijanjikan oleh Kepala Daerah Terpilih Mas'ud Yunus-Suyitno dalam proses Pemiluakda Tahun 2013 lalu yang telah disesuaikan dengan berbagai perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto yang telah ada sebelumnya.

Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2014-2019 adalah

**“Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai *Service City* yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral”.**

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini :

Visi: “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai <i>service city</i> yang Maju Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral”	
Pokok-pokok Visi	Penjabaran Visi
Kota Mojokerto sebagai <i>service city</i>	Kota yang memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
	1. Jasa layanannya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang mampu menarik kehadiran investor dan pelaku pasar lainnya
	2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa sumberdaya manusia dan infrastruktur yang baik dan memadai
Kota Mojokerto sebagai <i>Service city</i> yang maju	Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern, antara lain ditandai oleh:
	1. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan layanannya
	2. Dikelola dengan manajemen modern yang handal dan efisien

Visi: <b>“Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai <i>service city</i> yang Maju Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral”</b>	
	3. Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup
	4. Memiliki daya saing tinggi
	5. Mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas prima
<b>Kota Mojokerto sebagai <i>Service city</i> yang sehat</b>	Mewujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang
	1. iklim usaha yang kondusif dan mandiri
	2. lingkungan yang bersih dan bebas polusi
	3. kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan sanitasinya bagus
	4. pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek konservasi
	5. tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat.
<b>Kota Mojokerto sebagai <i>Service city</i> yang cerdas</b>	antara lain ditandai oleh:
	1. sumber daya manusia yang berkualitas
	2. pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing tinggi
	3. tata ruang yang efisien dan kondusif terhadap pengembangan sosial dan teknologi
	4. terbukanya akses pengetahuan dan teknologi
<b>Kota Mojokerto sebagai <i>Service city</i> yang sejahtera</b>	Layanan pemerintahan yang mampu memberi nilai tambah ekonomi dan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai oleh:
	1. Meningkatnya pendidikan dan kualitas SDM
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	3. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat
<b>Kota Mojokerto sebagai <i>Service city</i> yang bermoral</b>	Layanan pemerintahan yang penyelenggaraan layanannya dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika dan norma sosial, budaya,
	agama, maupun negara, antara lain ditandai oleh:
	1. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial
	2. Meningkatnya peranan budaya dan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
	3. Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman
	4. Rendahnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/ norma
	5. Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih dan baik ( <i>clean and good governance</i> )

Sumber: RPJMD Kota Mojokerto

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kota Mojokerto tahun 2014-2019 yang didalamnya mengandung gambaran tentang bagaimana tujuan serta sasaran dapat dicapai.

## 2.2 Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi Kota Mojokerto yaitu : “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral” maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut :

### 1) **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.**

Peningkatan sumber daya manusia adalah upaya mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas dengan dasar penuntasan wajib belajar 12 tahun. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi terhadap sumber daya manusia yang akan menjadi aset dalam pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, melalui pendidikan berkualitas, murah, dan terjangkau melalui program wajib belajar 12 tahun. Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kota Mojokerto untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kualitas kompetensi akademis yang tinggi, cerdas, dan bermoral, tanggap lingkungan dan memiliki skill (hard dan soft skill) yang tinggi, sehingga mampu hidup dan bersaing di tengah masyarakat dengan baik, mampu menjadi agen perubahan ke arah nilai-nilai yang baik.

Upaya tersebut didampingi dengan peningkatan mutu dan fasilitas penunjang untuk bisa mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota wiyata mandala. Untuk melayani masyarakat yang putus sekolah kota mojokerto menyelenggarakan pendidikan non formal dengan sasaran utama pembebasan masyarakat dari buta aksara. Sumberdaya manusia yang berkualitas berarti juga memiliki nilai-nilai religius yang dapat memanfaatkan keilmuan untuk mewujudkan kesalehan sosial. Untuk mencapai hal tersebut, maka pembangunan difokuskan pada:

- a) Pelayanan Kesehatan yang terjangkau, terutama penyediaan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi seluruh warga kota mojokerto
- b) Pendidikan gratis dan Berkualitas untuk warga kota mojokerto
- c) Perluasan Kesempatan Kerja dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja dan pengembangan semangat entrepreneurship bagi angkatan kerja.

d) Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin terutama ke cukupan energi, air bersih dan kesehatan lingkungan .

Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat maupun aparatur pemerintah baik formal maupun non formal yang memiliki kompetensi dan tingkat kesehatan yang baik, berbudi luhur yang didasari keimanan dan ketaqwaan sehingga mampu bersaing serta menciptakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih

Indikator peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditunjukkan dengan membaiknya Kesejahteraan rakyat terus meningkat. berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif.

## **2) Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi.**

Penyediaan produk, jasa dan layanan yang berdaya saing mengandung makna kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan menghasilkan nilai tambah. Pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, produktif, dan SDM aparaturnya bebas KKN sebagai dasar untuk mewujudkan produk jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi. Utamanya sektor UMKM dapat berkembang dengan baik dengan minimnya pungutan-pungutan liar sehingga dapat memfasilitasi dunia usaha yang bermoral adalah dunia usaha yang tidak korup, menjauhi budaya suap, bersaing secara sehat.

Kota Mojokerto sebagai kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. pembangunan perekonomian daerah yang didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah – daerah lain, terutama daerah penyangga (hinterland). Dengan demikian Kota Mojokerto akan dapat menjadi sentra

aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Sebagai kota jasa dengan demikian mencakup kesiapan kota dalam melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya :

- a) Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan / regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan.
- b) Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, Ruang Pamer Ruang Pertemuan, dan lain sebagainya.
- c) Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Customer engagement)
- d) Pola berpikir (Mindset) dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan

Untuk mendorong Kota Mojokerto sebagai kota produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi yakni dengan melalui penguatan sentra-sentra industri atau produk unggulan industri sesuai potensi daerah dengan meningkatkan penyebaran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

### **3) Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai.**

Penyediaan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang berkualitas yaitu melalui pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan IPTEK, peningkatan daya dukung kapasitas kota dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset daerah, sarana dan prasarana kota serta fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan infratraktur yang memperhatikan keteraturan, harmonisasi dengan lingkungan sekitar dan ketersediaan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi masal, listrik, air bersih, sekolah, lokasi perdagangan yang terpadu. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilaksanakan pada daerah di pusat kota

melainkan juga pada daerah pinggiran dan daerah industri pada daerah pinggiran untuk terwujudnya pemerataan pembangunan di semua wilayah Kota Mojokerto dapat berkembang menjadi kota Metropolis.

Peningkatan dan pengembangan infrastruktur tersebut meliputi sarana-prasarana: jalan dan jembatan; perumahan; lingkungan, perekonomian; kesehatan; pendidikan; sosial dan budaya; air bersih; ketahanan pangan; berfungsinya ruang terbuka hijau dan peribadatan. Hal ini untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera yakni lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi. Peningkatan infrastruktur yang baik untuk memfasilitasi jalannya roda ekonomi dan membuat kenyamanan berinvestasi di Kota Mojokerto.

#### **4) Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.**

Pembangunan yang mengedepankan keselarasan kehidupan social politik masyarakat yang berkeadilan dengan menjamin kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban dalam berbagai bidang serta memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

Lingkungan aman nyaman dan tentram dapat meningkatkan kinerja pemerintahan untuk melayani kebutuhan masyarakat baik berupa barang atau jasa. Peningkatan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram dapat dilakukan dengan upaya meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum. Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kemandirian dan ketertiban lingkungan dan penurunan angka kriminalitas. Hal ini bertujuan untuk terciptanya kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum.

Selain itu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram bermakna melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana di segala aspek. Untuk itu diperlukan mewujudkan kesiapsiagaan seluruh komponen (pemerintah, lembaga, dan masyarakat) dalam menghadapi ancaman kemungkinan terjadinya bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dan juga diperlukan langkah mitigasi pengendalian lingkungan dengan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup

Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai

dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing.

## 2.3 ARAH PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO

Mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Mojokerto di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah diterapkan secara berkesinambungan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan ditentukan melalui kerjasama sinergitas antara peran pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Arah Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada “payung besar” strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Jawa Timur 2014-2019.

### 2.3.1 Strategi Umum

Untuk mencapai visi Kota Mojokerto yaitu : “Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”, melalui 4 (empat) misi dilakukan berlandaskan tiga strategi umum, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*).
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment*.
- 3) Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).



Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019, sebagai kelanjutan dari pembangunan periode sebelumnya 2009-2014, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development), bahwa pembangunan Kota Mojokerto adalah pembangunan untuk semua, tanpa kecuali, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan, dan merata.

Strategi umum pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya (affirmative) kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, atau disebut pro-poor, yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (trade-off) satu terhadap lainnya.

Penjelasan lebih rinci mengenai ketiga strategi umum tersebut adalah sebagai berikut:

#### **2.3.1.1 Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat**

Strategi pembangunan berpusat pada rakyat (people centered development) menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat, dan kekhasan lokal, serta kearifan lokal.

Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif dilakukan dengan melibatkan, dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat melalui keberpihakan pemerintah (affirmative) kepada kelompok yang terpinggirkan atau termarginalisasi, untuk memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa kecuali, memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi.

Pembangunan inklusif yang berpusat pada rakyat mengedepankan pemberdayaan rakyat, sekaligus partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan proses aktif, di mana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

Kemampuan elemen masyarakat yang tertinggal ditingkatkan melalui pengembangan dan dinamisasi potensi yang mereka miliki, atau memberdayakannya. Upaya penggerakan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai

tambah ekonomis. Kemampuan penduduk miskin atau mereka yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya, akan meningkat, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya lokal.

Pemberdayaan sebagai implementasi dari pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya, sehingga partisipasi rakyat akan meningkat menjadi emansipasi rakyat. Tujuan akhir pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung, dan berdaya saing.

Strategi people-centered, participatory, empowering, dan sustainable tersebut lebih luas dari semata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net). Konsep ini merupakan strategi pembangunan alternatif, yang menghendaki adanya demokrasi inklusif (inclusive democracy), pertumbuhan ekonomi yang memadai (appropriate economic growth), kesetaraan gender, dan intergenerational equity.

Pengembangan demokrasi harus memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memiliki korelasi dengan upaya membebaskan kemiskinan. Penalaran publik dapat diartikan sebagai “alasan seluruh warganegara di dalam masyarakat yang majemuk”, yang dapat memfasilitasi perbedaan pendapat dalam berbagai masalah dengan alasan yang dapat diterima oleh bermacam orang dan/atau berbagai kelompok atau golongan masyarakat. Penalaran publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintahan yang senantiasa membuka diskusi publik, yang berlangsung sebagai perluasan kebebasan sipil, kebebasan politik, dan partisipasi, ditunjang oleh berfungsinya perangkat rule of law yang menyangga seluruh instrumen pemerintahan yang demokratis.

Di sinilah pentingnya pemahaman ide demokrasi dalam praktik penalaran publik sebagai isi dari hakikat berdemokrasi. Bagaimana kita mampu meningkatkan kapasitas masyarakat miskin untuk mengubah hubungan-hubungan kekuasaan, dan memajukan kebijakan-kebijakan alternatif yang berpihak kepada mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembentukan lembaga-lembaga berbasis komunitas lokal, meminjam konsep pemikiran Jurgen Habermas, sebagai “ruang publik deliberatif”, yang sekaligus merupakan sebuah inovasi sosio-kultural yang berbasis pada ruang komunitas lokal untuk memprakarsai perubahan kontekstual.

Inti dari demokrasi deliberatif adalah partisipasi warga secara langsung, dan tidak mengenal keterwakilan (representation), maupun istilah mayoritas dan minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerja sama antar-ide dan antar-pihak. Demokrasi deliberatif, atau

demokrasi musyawarah, lebih menonjolkan argumentasi, dialog saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu dan mufakat. Proses demokrasi deliberatif mendorong kompetensi komunikatif warga, yang memungkinkan setiap individu, tanpa kecuali, termasuk kaum marjinal, menyuarakan kebutuhannya.

“Rembug warga” merupakan pengejawantahan demokrasi deliberatif di tingkat lokal, yang memungkinkan terjadinya interaksi, komunikasi, dan dialog antar-warga yang mengedepankan penalaran publik. Pranata “rembug warga” merupakan pengorganisasian swadaya di tingkat komunitas yang menumbuhkan proses penyadaran kolektif, karena peserta “rembug warga” adalah warga aktif yang hadir bukan semata memenuhi undangan, tetapi sebagai pihak yang memiliki agenda itu sendiri.

Demokrasi harus memberi ruang kondusif bagi pembangunan agar pembangunan bukan sekadar dipahami sebagai capaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir, tetapi juga harus dipahami sebagai pengembangan ekonomi yang menyangkut perhatian pada hakikat kehidupan manusia itu sendiri, dan kebebasan yang dapat mereka nikmati, sebagai sesuatu yang esensial dari ide mengenai pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak cukup hanya mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengentasan rakyat miskin, peningkatan pendapatan rakyat yang memperhatikan pemerataan berkeadilan, peningkatan alokasi dana untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya, yang dapat makin memperluas dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kapabilitas rakyat.

Demokrasi juga harus ditekankan pada makna keadilan sosial, terutama konsep keadilan pada gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan imbalan bagi tindakan yang memberikan sumbangan untuk keuntungan bersama. Prinsip kebebasan harus mengacu pada kebebasan yang setara, di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan.

#### **2.3.1.2 Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*)**

Strategi pemberdayaan rakyat melepaskan diri dari perangkap trade off pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (trade-off) satu terhadap lainnya. Pemerataan akan menciptakan landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan menjamin pertumbuhan berkelanjutan, karena pola pertumbuhan adalah sama pentingnya dengan kecepatan pertumbuhan. Pola pertumbuhan yang tepat bukan yang vertikal, menghasilkan trickle-down, seperti yang telah terbukti tidak berhasil, tetapi haruslah yang bersifat horizontal (horizontal flows), yakni broadly based, employment intensive, dan tidak terkompartementalisasi.

Pertumbuhan ekonomi yang berjalan serempak dengan pemerataan merupakan pertumbuhan yang ramah bagi penduduk miskin, disebut *pro-poor growth*, yakni pertumbuhan ekonomi yang memperluas kesempatan dan kapabilitas penduduk miskin untuk lebih berpartisipasi, dan memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas ekonomi (Kimenyi, 2006). Sebuah pertumbuhan ekonomi belum cukup dikategorikan sebagai *pro-poor growth* jika hanya menyebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin, dengan mengabaikan ketimpangan peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi disebut *pro-poor growth* jika proporsi peningkatan rata-rata pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar daripada proporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin.

Strategi *pro-poor growth* secara konseptual memiliki definisi berbeda dengan strategi *pro-poor* dan *pro-growth* yang masing-masing berdiri terpisah, meski di dalam strategi *pro-poor growth* secara implisit juga mengandung unsur *pro-poor*, *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-environment*. Namun ketika keempat unsur tersebut tergabung di bawah konsep strategi *pro-poor growth*, maka melahirkan definisi baru yang berbeda dengan definisi masing-masing unturnya. Strategi *pro-poor growth* juga bukan sekadar hasil penjumlahan dari keempat unsur tersebut.

Meski demikian, upaya mencapai *pro-poor growth*, tidak dapat dilepaskan dari kandungan unsur strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*, yang masing-masing memiliki kontribusi untuk mewujudkan proporsi peningkatan rata-rata pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar daripada proporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin. Pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) harus dapat menciptakan lapangan kerja (*pro-job*), dan pendapatan yang lebih baik bagi semua golongan masyarakat, terutama penduduk miskin (*pro-poor*), serta pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan (*pro-environment*).

Melalui strategi tersebut, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan mampu berjalan serempak, sehingga pertumbuhan ekonomi melibatkan, menyentuh, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi semua, termasuk penduduk miskin, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi pada saat yang sama disertai penurunan jumlah penduduk miskin, dan juga penurunan ketimpangan pendapatan.

### 2.3.1.3 Pengarusutamaan gender (*pro-gender*)

Strategi umum pembangunan Kota Mojokerto dijalankan dengan pengarusutamaan gender untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, di mana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai pelaku

(subjek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dilaksanakan dengan membuka kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, agar dapat memberikan manfaat bagi perempuan yang setara dengan laki-laki.

### **2.3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan**

Berbagai strategi pembangunan di atas, ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan posisi Kota Mojokerto yang dititik beratkan pada peningkatan Indek Pembangunan Manusia, Indeks Good Governance dan Indeks Pembangunan Gender, dan konsep pembangunan berkelanjutan untuk menyelaraskan antara pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi.

Strategi untuk mencapai tujuan misi pertama, difokuskan pada indeks pembangunan manusia, strategi untuk mencapai tujuan misi kedua difokuskan untuk meningkatkan indeksgood governance, strategi untuk mencapai tujuan pada misi ketiga difokuskan untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana dan strategi untuk mencapai tujuan misi keempat difokuskan untuk meningkatkan indeks pembangunan berkelanjutan.

## **2.4 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO**

### **2.4.1 Rencana Pusat Pelayanan Kota**

Pusat kota mempunyai skala pelayanan skala kota dan/atau regional, yang harus mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto dan mendukung kegiatan skala regional pada hirarki di atasnya. Deliniasi untuk penentuan pusat kota berdasarkan dominasi kegiatan.

Untuk Kota Mojokerto, pusat kota terdapat di Kantor Walikota, Jl. Gajah Mada, Kelurahan Balongsari. Dominasi kegiatan untuk pusat kota ini adalah:

- 1) Pusat Pemerintahan Kota Mojokerto terdapat di kantor Walikota, Jalan Gajah Mada.
- 2) Pusat perdagangan dan jasa meliputi wilayah sekitar Pasar Tanjung Anyar dan Jl. Majapahit di wilayah Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Sentanan,

Kelurahan Purwotengah, dan Kelurahan Jagalan. Dengan demikian, kegiatan perkotaan untuk skala regional terkonsentrasi di pusat kota.

Peran kota Mojokerto ditinjau secara eksternal maupun internal menyangkut :

- 1) Kedudukan Kota Mojokerto terhadap kegiatan sosial ekonomi kota dan wilayah belakangnya (hinterland)
- 2) Ruang fisik (spasial) Kota Mojokerto merupakan kesatuan dengan wilayah sekitarnya
- 3) Kaitan antara pengembangan kota dengan perkembangan wilayah belakangnya, yakni pertimbangan arah pengembangan kota yang dapat meningkatkan fungsi dan peran kota serta interkasi dengan wilayah belakangnya.
- 4) Pertumbuhan kegiatan sektor ekonomi dan prediksi kebutuhan ruang pengembangan

Sesuai dengan pola perkembangan dan pertumbuhan Kota Mojokerto serta peran Kota Mojokerto dalam lingkup yang lebih luas maka fungsi dan peran Kota Mojokerto ditentukan sebagai :

- 1) Pusat pemerintahan,
- 2) Pusat perdagangan jasa skala regional, dan.
- 3) Pusat Kesehatan skala regional.

Fungsi sebagai pusat perdagangan jasa skala regional, karena terdapat pusat perdagangan dan jasa modern dan tradisional skala regional diantaranya Perdagangan Modern berupa Swalayan (CAREFOUR di Jalan Benteng Pancasila, SANRIO Jl. Bhayangkara, SULTAN KRATON MOJOPAHIT di Jl. Mojopahit, dan BENTAR di Jl. Mojopahit), Perdagangan Modern berupa Pertokoan di sepanjang Jalan Mojopahit, Jl. Gajah Mada, Jl. PB. Sudirman, Jl. Residen Pamuji, Jl. Bayangkara, Jl. Empu Nala dan Jl. By Pass. Pasar Tradisional berupa Pasar Tanjung Anyar di Kelurahan Jagalan, Pasar Prapanca di Kelurahan Mentikan, Pasar Prajuritkulon, Pasar Kranggan, Pasar Burung di Kelurahan Balongsari dan Pasar Hewan di Kelurahan Miji.

- 4) Pusat industri

Perkembangan industri yang cukup pesat, yaitu adanya Industri Rokok Bokor Mas dan industri sepatu ProATT di Kelurahan Kranggan, industri pakan ternak di Jalan By Pass Kelurahan Kedundung dan industri kecil lainnya seperti home industri makanan khas Mojokerto (onde-onde, keciput) di Kelurahan Mentikan dan Gunung Gedangan, industri kecil sepatu dan sandal yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kecamatan prajurit kulon dan Kecamatan Magersari, industri Gips yang produknya antara lain tempat miniuman, mainan anak-anak, buah-buahan, boneka/badut, patung manusia/binatang serta lain-lainya yang diproduksi di Jl. Gedongan di Kelurahan Gedongan, Terdapat industri Miniatur Perahu Layar Tradisional di Kelurahan Prajurit

Kulon serta industri kecil pembuatan alat pembuat kue dari logam yang ada di Kelurahan Pulorejo, home industry di Batik Tulis di Kelurahan Surodinawan

5) Pusat pendidikan

Fasilitas pendukung fungsi Kota Mojokerto tersebut antara lain kompleks sekolah mulai TK, SD, SMP sampai SMA di Jl. Pemuda, Perguruan Tinggi Universitas Mayjend. Sungkono di Kelurahan Kranggan dan Akademi Perawat dan Kebidanan di Kelurahan Kranggan dan Kelurahan Surdinawan serta kompleks SMK terpadu di Kelurahan Gunung Gedangan.

6) Pusat pelayanan kesehatan

Skala regional dan skala lokal yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Tipe B di Jalan Surodinawan, Rumah Sakit Rekso Waluyo di Jl. Majapahit, Rumah Sakit Gatoel di Jalan R. Wijaya, Rumah Sakit Sayang Bunda di Jl. Gajah Mada, Rumah Sakit Kamar Medika di Jl. Empu Nala, Rumah Sakit Emma di Jl. Ijen, Rumah Sakit Hasanah, dan Rumah Sakit Hadiono Singgih.

#### 2.4.2 Rencana Pola Ruang Kota Mojokerto

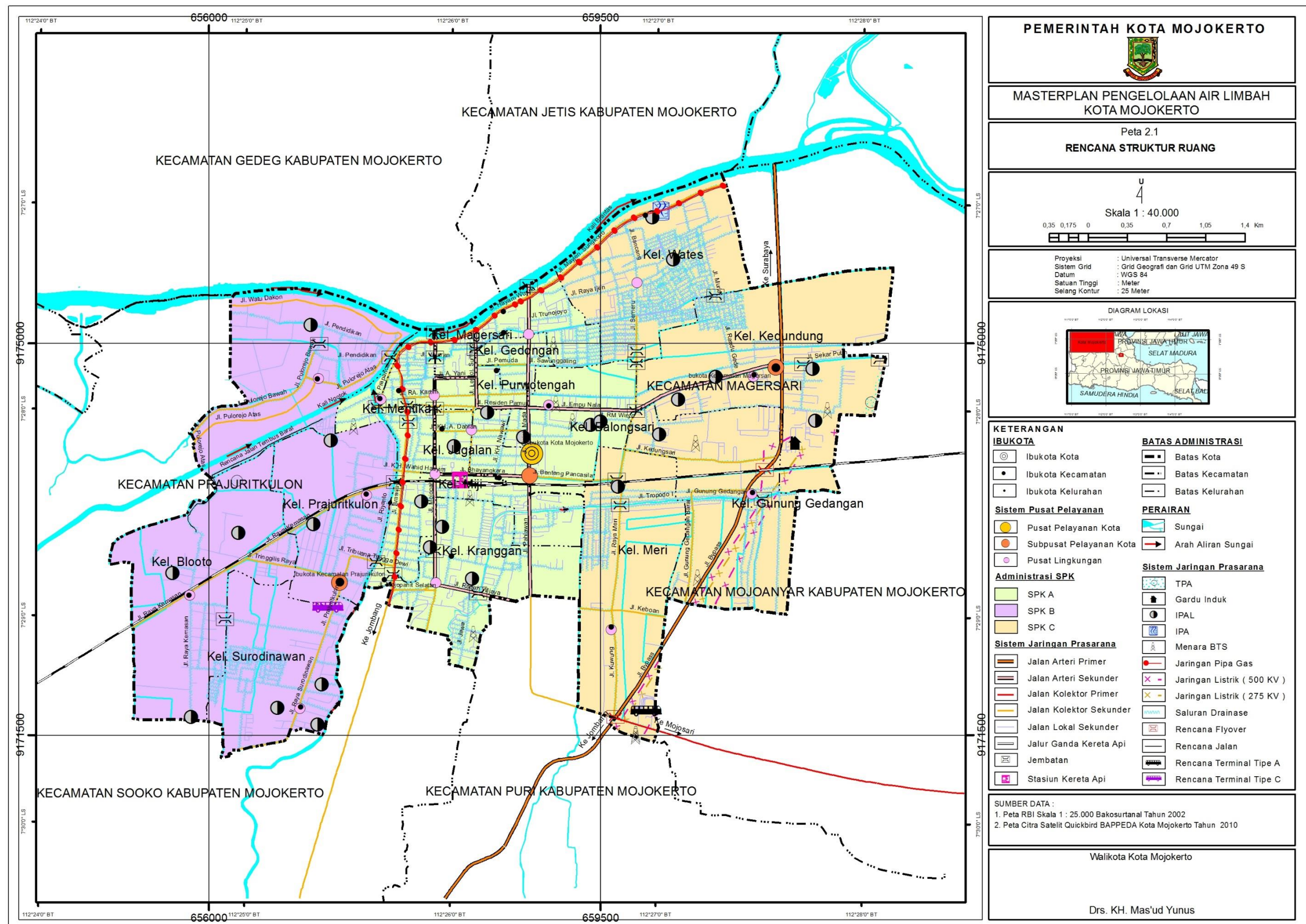
Rencana penggunaan lahan untuk Kota Mojokerto pada tahun perencanaan 2012–2032 diharapkan dapat menyebar ke arah barat dan timur. Hal ini dimaksudkan agar bisa untuk mengurangi dan menyeimbangkan beban kawasan fungsional dan kegiatan masyarakat yang terkonsentrasi di pusat dan kawasan timur. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana Pola Ruang Kota Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan Peta 2.2.

Tabel 2. 1 Rencana Pola Ruang Kota Mojokerto Tahun 2032

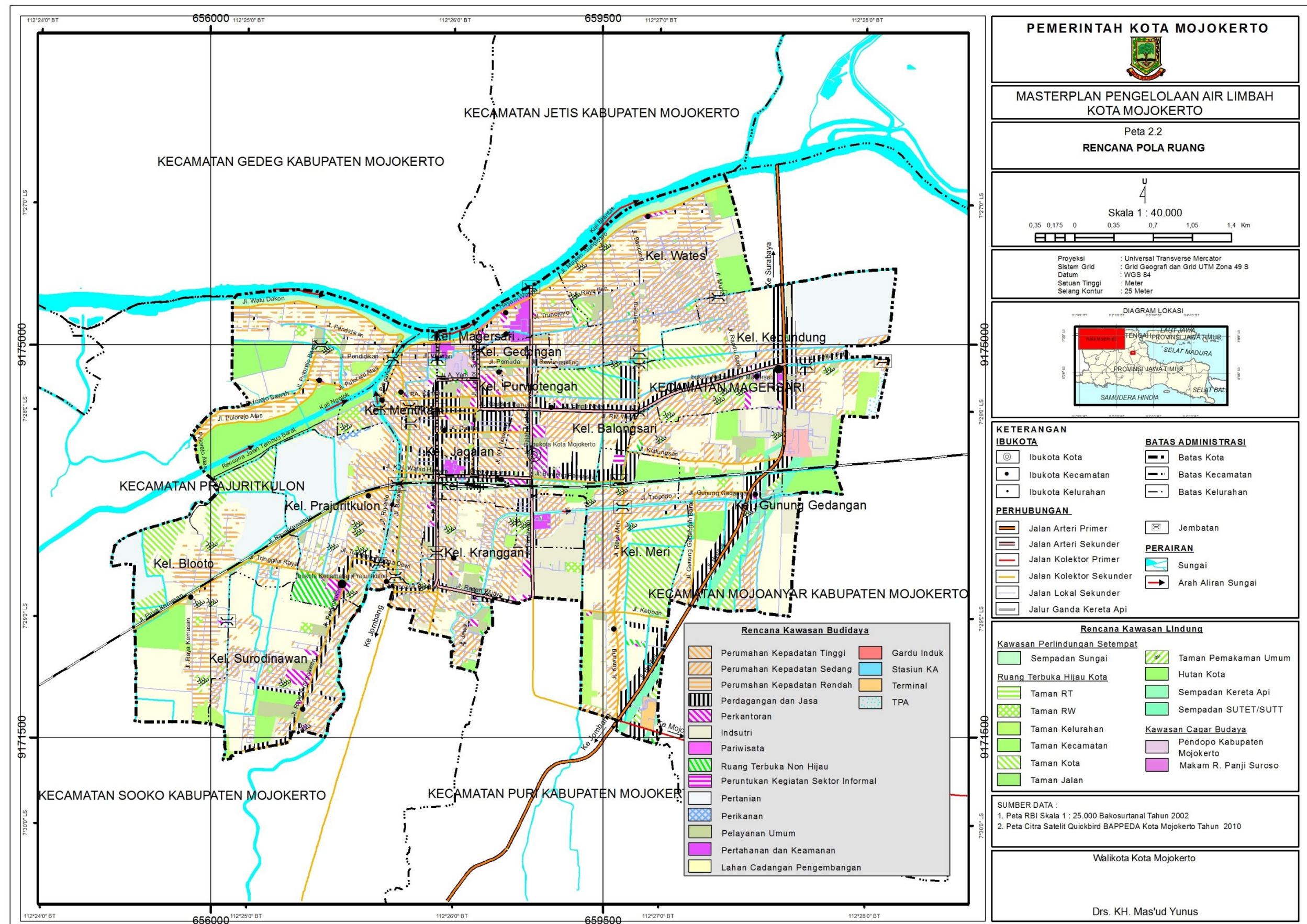
No	Kecamatan/ Kelurahan	Kawasan Lindung											Cagarbudaya
		Perlindungan Setempat			RTH KOTA								
		ssungai	ska	ssutt	Hutan kota	T Kota	TKecamatan	Tkelurahan	TRW	TRT	TPU	Taman Jalan	
1	Kec. Prajurit Kulon												
	1. Surodinawan	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	1.14	1.33	0.29	0.85	0.30	0.15
	2. Kranggan	2.05	0.00	0.00	1.61	0.40	0.00	1.90	1.22	0.02	1.64	0.43	0.00
	3. Miji	0.99	1.92	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.15	0.04	1.08	0.10	0.00
	4. Prajurit Kulon	2.31	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.27	0.19	2.33	0.22	0.00
	5. Blooto	0.45	4.27	0.00	10.85	33.75	0.00	2.50	0.44	0.29	3.25	0.08	0.00
	6. Mentikan	0.69	0.16	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.97	0.01	0.49	0.16	0.00
	7. Kauman	0.64	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.06	0.00
	8. Pulorejo	9.44	0.00	0.00	36.97	1.73	0.00	1.37	0.93	0.08	0.65	0.46	0.00
2	Kec. Magersari												
	1. Meri	2.99	2.74	4.63	5.47	30.08	0.00	6.05	0.32	0.31	0.94	0.32	0.00
	2. Gunung Gedangan	1.55	3.01	13.41	7.84	7.19	6.10	0.00	0.65	0.31	1.13	0.01	0.00
	3. Kedundung	1.63	1.03	1.90	11.65	8.71	0.02	5.13	0.82	0.17	6.53	0.30	0.00
	4. Balongsari	0.36	1.64	0.00	0.86	17.95	0.00	0.00	0.70	0.00	0.17	0.27	0.00
	5. Jagalan	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.02	0.00
	6. Sentanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Purwotengah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
	8. Gedongan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.13	0.00
	9. Magersari	0.68	0.00	0.00	0.02	0.92	0.00	0.00	0.34	0.06	0.00	0.30	2.04
	10.Wates	6.75	0.00	0.00	10.45	2.50	0.00	0.84	0.42	0.37	1.14	0.48	0.00
	Jumlah	32.33	17.55	19.94	86.85	103.86	14.48	19.32	9.27	2.14	20.21	3.67	2.18
	Persentase	1.96	1.07	1.21	5.27	6.31	0.88	1.17	0.56	0.13	1.23	0.22	0.13

No	Kecamatan/ Kelurahan	Kawasan Budidya																
		Perumahan	Perdagangan/jasa	Perkantoran	Industri	Pariwisata	Infomal	RINH	Pelayanan umum	Pertahanan dan Keamanan	Lahan Cadangan	Pertanian	Perikanan	Terminal/ S tasium	Gardu	TPA	Jalan	Sungai
1	Kec. Prajurit Kulon																	
	1. Surodinawan	3067	1012	347	104	000	027	002	904	000	6275	360	000	000	000	000	926	143
	2. Kranggan	4068	588	243	1823	000	000	032	849	000	1731	000	000	000	000	000	905	163
	3. Mji	1740	441	048	416	000	010	005	033	084	176	000	000	014	000	000	418	093
	4. Prajurit Kulon	2946	379	180	000	000	000	791	151	045	2108	3558	105	000	000	000	695	161
	5. Blooto	3105	028	033	072	000	000	000	063	000	2910	5264	000	000	000	000	601	144
	6. Mentikan	770	359	005	000	000	000	000	070	000	011	000	009	000	000	000	179	177
	7. Kauman	977	164	034	011	000	000	000	044	041	013	000	000	000	000	000	278	158
	8. Pulorejo	3423	101	015	000	000	000	000	188	000	1873	1244	008	000	000	000	647	1574
2	Kec. Magersari																	
	1. Meri	3819	1711	060	019	000	077	099	134	000	3856	000	000	252	000	000	866	205
	2. Gunung Gedangan	3165	1763	021	1064	000	000	046	301	000	5327	000	000	000	004	000	1023	211
	3. Kedundung	4208	2126	207	5792	000	000	024	211	028	4367	000	000	000	449	265	1143	254
	4. Balongsari	1775	1282	457	000	000	000	027	386	000	1584	000	000	000	000	000	540	041
	5. Jagalan	662	594	074	000	000	000	000	095	000	018	000	000	000	000	000	180	000
	6. Sentanan	390	651	031	000	000	000	000	032	130	000	000	000	000	000	000	126	000
	7. Purwotengah	386	459	170	000	000	000	008	165	000	000	000	000	000	000	000	152	003
	8. Gedongan	824	175	014	000	000	000	010	187	034	015	000	000	000	000	000	163	012
	9. Magersari	1325	053	094	000	047	000	050	021	262	200	000	000	000	000	000	402	400
	10.Wates	9996	560	058	310	000	000	029	487	000	1545	000	000	000	000	000	1271	658
	Jumlah	42640	12448	2091	9611	047	1.15	1124	4326	624	32010	10425	122	266	453	265	10513	4397
	Persentase	2590	756	127	584	003	007	068	263	038	1944	633	007	016	028	016	639	267









### 2.4.3 Rencana Permukiman Kota Mojokerto

Kawasan perumahan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan permukiman yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Pada dasarnya kawasan perumahan terbagi atas perumahan yang sengaja dikembangkan oleh developer, perumahan masyarakat yang berkembang dengan sendirinya serta perkampungan dengan kondisi bangunan dan lingkungan yang kurang memadai.

Pengembangan kawasan permukiman secara umum adalah dengan :

- 1) Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan/kebun dll).
- 2) Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur penunjang permukiman terhadap luas total sebesar 40%.
- 3) Pengembangan taman ditiap unit lingkungan, taman subpusat pusat pelayanan kota, taman kota, dsb. Pendetailan ada di sub bab RTH.

Perkembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto meliputi : kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari rumah yang dibangun oleh penduduk sendiri dan dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan (developer) dan/atau dibangun oleh Pemerintah. Dimana perkembangan kawasan tersebut terdiri atas fungsi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah.

Kawasan perumahan yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 426,40 Ha atau sekitar 25,90% dari luas seluruh Kota Mojokerto. Adapun perumahan itu direncanakan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu : perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah. Adapun distribusi dari masing-masing adalah sebagai berikut :

#### 1) Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan kepadatan tinggi diarahkan berlokasi di : Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Gedongan, dan Kelurahan Magersari. Adapun luas dari perumahan kepadatan tinggi tersebut adalah sebesar 110,40 Ha atau sekitar 6,71%.



## 2) **Perumahan Kepadatan Sedang**

Rencana perumahan kepadatan sedang adalah seluas 212,24 Ha atau sekitar 12,89% dari luas total wilayah kota. Untuk perumahan kepadatan sedang ini dialokasikan berada di wilayah : Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates.

## 3) **Perumahan Kepadatan Rendah**

Pada perumahan kepadatan rendah ini diarahkan pada Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates. Rencana dari perumahan kepadatan rendah ini adalah sebesar 108,21 Ha atau sekitar 6,57%.

Adapun arahan-arahan pengembangan kawasan perumahan di Kota Mojokerto antara lain adalah :

- 1) Pengembangan perumahan yang telah ada dan pengembangan perumahan baru.
- 2) Pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horisontal) dengan memanfaatkan lahan secara optimal pada kawasan di luar kawasan fungsi lindung.
- 3) Peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana lingkungan perumahan meliputi pembenahan lingkungan dan peremajaan.
- 4) Pembentukan Kelembagaan Lokal dan Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan, termasuk kegiatan swadaya masyarakat berbasis konsep "Tridaya".

Berdasarkan jenisnya, kebutuhan perumahan di wilayah perencanaan dibagi menjadi perumahan kapling besar, kapling sedang dan kapling kecil dengan menggunakan perbandingan 1:3:6. Standar luas kebutuhan perumahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kapling Besar luas 500 m<sup>2</sup>
- 2) Kapling Sedang luas 300 m<sup>2</sup>
- 3) Kapling Kecil luas 150 m<sup>2</sup>

Menurut hasil analisa yang telah dilakukan kebutuhan rumah di Kota Mojokerto pada akhir tahun perencanaan pada tahun 2032 sebesar 41.699 unit seluas 10.772.343 m<sup>2</sup>. Jumlah rumah pada tahun 2027 sebanyak 38.992 unit, seluas 10.073.021 m<sup>2</sup>, kebutuhan rumah pada tahun 2022 sebanyak 32.685 unit, seluas 9.373.699 m<sup>2</sup>, kebutuhan rumah pada

tahun 2017 sebanyak 33.037 unit, seluas 8.534.514 m<sup>2</sup>, dan kebutuhan rumah pada tahun 2012 sebanyak 30.330 unit, seluas 7.835.892 m<sup>2</sup>.

#### **2.4.4 Rencana Pengembangan Fasilitas Kota Mojokerto**

##### **1) Fasilitas Perdagangan dan Jasa**

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan bertujuan untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala beberapa kabupaten. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terdapat di Kota Mojokerto direncanakan seluas 124,48 atau sekitar 7,56%.

Adapun rencana pengembangan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu :

##### **a) Pasar tradisional**

Pasar tradisional di Kota Mojokerto diantaranya adalah Pasar Tanjung Anyar, Pasar Kliwon, Pasar Kranggan, Pasar Prapanca, Pasar Prajuritkulon, Pasar Hewan, dan Pasar Burung Empu Nala. Untuk pasar tradisional ini direncanakan dengan luas sebesar 6,93 Ha atau sekitar 0,42% dan diarahkan pada : Kelurahan Kranggan, Kelurahan Prajurit Kulon, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Jagalan, dan Kelurahan Purwotengah.

Selain itu juga ada beberapa rencana dalam pengembangan pasar tradisional, antara lain adalah :

- a) Rencana revitalisasi pasar tradisional Tanjung Anyar yang bisa mengakomodasi pasar tradisional dan pasar moderen.
- b) Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian timur kota yaitu di Kelurahan Kedundung atau Kelurahan Gunung Gedangan.
- c) Adanya rencana membangun pasar lingkungan di bagian barat kota yaitu di Kelurahan Blooto atau Kelurahan Pulorejo.
- d) Adanya relokasi atau revitalisasi pasar Kranggan dan pasar Prajuritkulon.

##### **b) Pusat perbelanjaan dan toko modern**

Kawasan perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai luas lebih kurang 120,58 Ha atau kira-kira sebesar 3,32%. Adapun lokasi dari pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut diarahkan pada :

- Jl. Mojopahit dan Mojopahit Selatan
- Jl. Bhayangkara
- Jl. Gajah Mada

- Jl. HOS Cokroaminoto
- Jl. PB Sudirman
- Jl. Residen Pamuji
- Jl. Letnan Kolonel Sumarjo
- Jl. Ahmad Yani
- Jl. Raya Prajuritkulon
- Jl. Bypass
- Jl. Surodinawan
- Jl. Benteng Pancasila dan
- Jl. Ijen

Adapun rencana pengembangan pada kawasan perdagangan dan jasa pada subpusat pelayanan ini adalah sebagai upaya untuk bisa melayani daerah sekitarnya. Selain itu, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan dalam hal pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, antara lain sebagai berikut :

- Memperhatikan pelaku sektor informal pada perdagangan dan jasa.
- Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.
- Pelaksanaan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan.

Berdasar pada standart tersebut di atas, maka kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa di Kota Mojokerto hingga akhir tahun perencanaan 2032 adalah

- a) Warung sebanyak 667 unit seluas 6,7 Ha yang akan didistribusikan disetiap unit pengembangan.
- b) Pertokoan sebanyak 53 unit seluas 6,4 Ha akan didistribusikan disetiap unit pengembangan.

- c) Pusat perbelanjaan lingkungan 4 unit seluas 6,0 Ha didistribusikan disetiap pusat pelayanan masing-masing 2 unit.
- d) Pusat perbelanjaan niaga sebanyak 1 unit seluas 3,98 Ha didistribusikan dipusat pengembangan kawasan di Kelurahan Kedundung Kota Mojokerto.

## 2) Kawasan Peruntukan Perkantoran

Sebagai salah satu kota yang diharapkan berkembang dengan lebih baik lagi, maka akan semakin beragam aktifitas kota yang akan terjadi. Salah satunya adalah aktifitas perkantoran baik perkantoran pemerintah maupun swasta. Kawasan perkantoran ini dikembangkan dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan hemat.

Penyatuan dalam suatu kawasan akan relatif membantu bagi para pengguna dalam mengakses jasa pelayanan yang diberikan suatu kantor. Terlebih bagi kantor pemerintahan yang sering digunakan dalam melayani kebutuhan penduduk kota yang berada dalam dua atau lebih satuan kerja yang memiliki bangunan tersendiri. Hal ini perlu diupayakan kemenyatuan dalam satu kawasan, sehingga penduduk kota tidak perlu harus menempuh jarak yang relatif jauh ataupun berpindah-pindah. Cukup dengan mendatangi satu kawasan dan melakukan pergerakan di sekitar kawasan itu saja.

Rencana pengembangan kawasan perkantoran di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut :

- a) Pusat pemerintahan tetap dipertahankan di pusat kota, dan fasilitas pemerintahan yang tersebar dipertahankan untuk efisiensi pelayanan meliputi : Jl. Pahlawan, Jl. Gajah Mada, Jl. Bhayangkara, Jl. Raden Wijaya, Jl. Bypass, Jl. Jawa, Jl. Letkol Sumarjo, dan Jl. Raya Prajuritkulon.
- b) Peningkatan fisik pembangunan pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi, jika lahan terbatas dapat dikembangkan secara vertikal).
- c) Rencana pengembangan kawasan perkantoran terpadu di rencanakan di Kelurahan Surodinawan dengan luasan total sebesar lebih kurang 20,91 Ha atau sekitar 1,27%.
- d) Kawasan perkantoran swasta diarahkan pada kawasan pusat kota dan menyatu pada pusat-pusat kawasan perdagangan dan jasa, yang direncanakan di : Jl. Bypass, Jl. Pahlawan, Jl. Gajahmada, Jl. Mojopahit, Jl. Raya Prajuritkulon, dan Jl. Surodinawan.

- e) Pengembangan kapasitas pemerintahan (meliputi : peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerja sama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan).

### 3) Kawasan Peruntukan Industri

Kegiatan peruntukan industri yang terdapat di Kota Mojokerto meliputi industri kecil/rumah tangga dan industri besar.

#### a) Industri Kecil/rumah tangga

Industri-industri kecil yang terdapat di Kota Mojokerto diantaranya meliputi :

- Industri batik tulis di Kelurahan Surodinawan dan lingkungan Keboan dan Kelurahan Gunung Gedangan.
- Industri miniatur perahu layar tradisional yang terdapat di Jalan Brawijaya, Kedung Kwali dan Kelurahan Prajuritkulon.
- Industri gips (yang produknya antara lain tempat miniuman, mainan anak-anak, buah-buahan, boneka/badut, patung manusia/binatang serta lain-lainnya) yang diproduksi di Jalan Gedongan.
- Industri keciput dan onde-onde, industri sepatu dan sandal yang tersebar di Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Meri, Kelurahan Wates, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Magersari, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Miji, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Kauman, dan Kelurahan Mentikan.
- Industri cetakan kue yang berbahan dasar dari alumunium.

#### b) Industri Sedang

Industri sedang meliputi :

- Industri rokok Bokor Mas di Jl. Pahlawan
- Industri sepatu Dragon di Jl. Pahlawan
- Industri pakan ternak Pok Han di Jl. By Pass

Rencana kawasan industri sedang Kota Mojokerto direncanakan di Jalan By Pass, Kelurahan Kedundung dengan luas kurang lebih 47,47 Ha atau 2,88%. Rencana pengembangan kawasan industri di Kota Mojokerto yang diperkirakan seluas 96,11 Ha atau sebesar 5,84%, yang diarahkan dengan rencana sebagai berikut :

- a) Pembangunan industri wajib menyiapkan prasarana lingkungan, utilitas umum, bangunan perumahan pekerja dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.



- b) Pembangunan kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan meliputi radius/jarak, tingkat pencemaran, dan upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan sekitarnya.
- c) Pembangunan kawasan industri harus memenuhi kebutuhan luas lahan, jenis ruang dan fasilitas pelayanan publik meliputi parkir, ruang terbuka hijau, ruang pedagang kaki lima, pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- d) Pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri harus disertai upaya- upaya terpadu mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL), penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan disertai pengawasan oleh Pemerintah Daerah secara intensif terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan.

#### 4) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan wisata yang terdapat di Kota Mojokerto, yaitu : wisata air jogging track dan kuliner di Sungai Brantas, Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Magersari dengan luas 0,47 Ha atau 0,03%, wisata penunjang perbelanjaan, wisata pemandian Tirta Suam, wisata pemandian Sekar Sari, wisata Sentra Industri dan Kerajinan (SIK) di Jalan By Pass, wisata kampung sepatu di Kel. Miji, wisata religi Masjid Al-Fatah di Kel. Kauman, wisata di kawasan alun- alun, wisata kampung bunga di Kel. Kauman, wisata kampung cor di Kel. Pulorejo, wisata kampung batik di Kel. Surodinawan dan Kel. Gunung Gedangan, wisata sumber air panas Kedungsari, dan wisata religi makam KH. Achyat Chalimy di Jalan. KH. Wachid Hasyim. Rencana pengembangan wisata di Kota Mojokerto yaitu :

##### a) Pengembangan semua wisata yang terdapat di Kota Mojokerto

##### b) Pengembangan wisata penunjang perbelanjaan

Wisata penunjang perbelanjaan yang dikembangkan meliputi :

- Pengembangan sentra PKL untuk makanan di Jl. Benteng Pancasila
- Pengembangan big sale dan exhibition di mall
- Pengembangan sentra pemasaran industri rumah tangga/kecil
- Bypass, dan pasar wisata di Kel. Gunung Gedangan dengan konsep pasar burung, bunga, hewan piaraan, barang antik dan buku-buku bekas.

##### c) Pengembangan jalur pariwisata GKS

- Pengembangan jalur wisata GKS ini adalah pengembangan wisata jaringan sejarah, dan aset alamiah (termasuk pengembangan rekreasi olah raga, pusat informasi, dan wisata alam).

## 5) Fasilitas Pendidikan

Pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyediaan sumber daya manusia yang dapat mendukung peran dan fungsi Kota Mojokerto sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota dan regional. Rencana pembangunan fasilitas pendidikan diarahkan sebagai berikut ini :

- a) Peningkatan kualitas pendidikan, dan pembenahan prasarana dan sarana.
- b) Pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya.
- c) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi diarahkan di Kelurahan Surodinawan.

Prediksi kebutuhan fasilitas pendidikan menggunakan standart :

- a) Asumsi 1 TK terdiri dari 2 kelas yang dapat menampung 35-40 murid/kelas, luas tanah : 1.200 m<sup>2</sup>.
- b) Asumsi 1 SD terdiri dari 6 kelas yang dapat menampung 40 murid/kelas, luas tanah : 1.200 m<sup>2</sup>.
- c) Asumsi : 3 (tiga) SD dilayani oleh 1 (satu) SLTP dengan luas tanah yang dibutuhkan 2.700 m<sup>2</sup>.
- d) Asumsi : 1 (satu) SLTP dilayani oleh 1 (satu) SLTA dengan luas tanah yang dibutuhkan 2.700 m<sup>2</sup>

## 6) Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standart pelayanan yang ada baik dalam skala kota maupun regional. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut :

- a) Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang ada meliputi rumah sakit milik Pemerintah Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, rumah sakit swasta, dan puskesmas juga pembangunan fasilitas kesehatan baru.
- b) Penyediaan rumah sakit skala regional untuk mengantisipasi perkembangan di Mojokerto yaitu Rumah Sakit Umum Daerah yang terdapat d Kelurahan Surodinawan dengan Tipe B.

Penentuan kebutuhan fasilitas kesehatan menggunakan standar sebagai berikut :

- a) 1 unit Balai Pengobatan dengan penduduk pendukung 3.000 jiwa dengan luas 300 m<sup>2</sup> atau 0,03 Ha.

- b) 1 unit BKIA+Rumah Bersalin dengan penduduk pendukung 30.000 jiwa dengan luas 1.600 m<sup>2</sup> atau 0,16 Ha
- c) 1 unit Puskesmas Pembantu dengan penduduk pendukung 30.000 jiwa dengan luas 1.200 m<sup>2</sup> atau 0,12 Ha.
- d) 1 unit Puskesmas dengan penduduk pendukung 120.000 jiwa dengan luas 2.400 m<sup>2</sup> atau 0,24 Ha.
- e) 1 unit Praktek Dokter dengan penduduk pendukung 5.000 menyatu dengan rumah.
- f) 1 unit Apotik dengan penduduk pendukung 10.000 jiwa dengan luas 350 m<sup>2</sup> atau 0,035 Ha.
- g) 1 unit Rumah Sakit dengan penduduk pendukung 240.000 jiwa.

## 7) Fasilitas Peribadatan

Pembangunan tempat peribadatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah bagi semua golongan masyarakat warga Kota Mojokerto baik pada skala kota maupun skala lingkungan.

Rencana pengembangan fasilitas peribadatan di Kota Mojokerto diarahkan sebagai berikut :

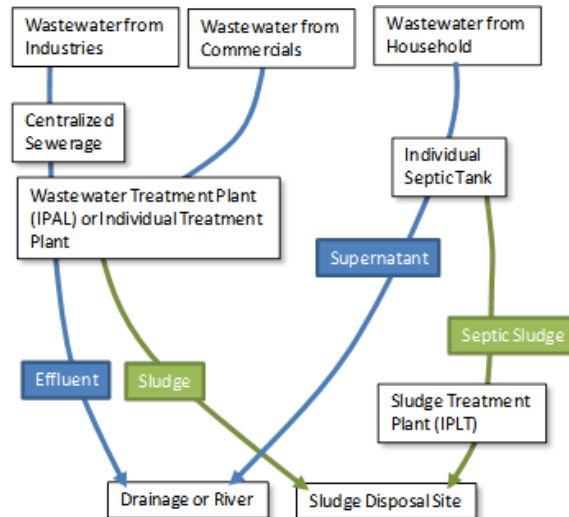
1. Perbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada.
2. Kawasan peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.4.5 Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Rencana sistem pengelolaan air limbah untuk Kota Mojokerto antara lain adalah :

#### 1) Manajemen sanitasi-air limbah

Tingkat pengelolaan yang di persyaratkan untuk air limbah industri dan komersial di tentukan berdasarkan jenis usaha dan di atur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Air limbah industri dan komersial terutama di kelola secara individual kecuali di kawasan industri. Untuk jelasnya lihat gambar dibawah ini.



**Gambar 2. 1 Sistem Pengelolaan Air Limbah di Kawasan GKS**

## 2) Monitoring kapasitas untuk pengendalian pencemaran

Untuk sekarang ini, kualitas air sungai terus-menerus mengalami penurunan walaupun sudah ada standar peraturan yang ditetapkan. Standar tersebut memiliki sasaran untuk mengkonservasi kualitas sumber daya air, pihak terkait harus membuat langkah-langkah untuk menanggulangi penurunan kualitas air sungai tersebut, antara lain adalah :

- Mencatat kualitas air limbah, khususnya untuk industri dan air sungai.
- Monitoring kualitas air dilaksanakan di 60 lokasi di Sungai Brantas secara bulanan oleh PJT1.

Limbah di Kota Mojokerto dibedakan menjadi 2, yaitu limbah industri dan limbah rumah tangga. Penanganan masalah limbah di wilayah perencanaan adalah sebagai berikut :

### 1) Limbah Domestik/Rumah Tangga

Air limbah domestik adalah air bekas yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan semula baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktifitas dapur, kamar mandi dan cuci dimana kuantitasnya antara 50%-70% dari rata-rata pemakaian air bersih. Air limbah domestik mengandung lebih dari 90% cairan. Zat-zat yang terdapat dalam air buangan diantaranya adalah unsur-unsur organik tersuspensi maupun terlarut dan juga unsur-unsur anorganik serta mikroorganisme. Sistem pembuangan air limbah merupakan penanganan masalah pembuangan baik kotoran yang berasal dari manusia maupun kotoran yang berasal dari buangan rumah tangga (domestik), agar kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat terjaga. Standar dan kriteria yang dipergunakan dalam perencanaan sanitasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Lingkungan  
Lingkungan tidak mengalami kontaminasi lebih lanjut seperti tanah, air tanah dan air permukaan yang akan masuk ke sumber air atau sumur. Perbaikan sanitasi sebaiknya membuat kualitas lingkungan lebih baik dan lebih sehat.
- b) Menyenangkan untuk digunakan  
Dalam merencanakan sanitasi sebaiknya mudah dan nyaman untuk digunakan
- c) Menggunakan bahan dan tenaga setempat  
Memanfaatkan bahan dan tenaga setempat yang berkualitas dimaksudkan untuk menekan biaya seminimal mungkin.
- d) Dapat dan mudah diperbaiki  
Penerapan fasilitas sanitasi pada lokasi yang padat penduduk harus dapat dan mudah diperbaiki serta dikembangkan
- e) Mudah dalam pengoperasiannya  
Dalam mengoperasikan fasilitas sanitasi harus sederhana dan aman.
- f) Fasilitas sanitasi yang direncanakan harus merupakan pilihan masyarakat sebagai alternatif teknologi yang termurah dan sesuai dengan kemampuannya
- g) Perencanaan sanitasi sebaiknya tahan lama

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di masa datang, maka diperlukan adanya perencanaan sistem pembuangan air kotor yang optimal, meliputi :

#### **1) Sistem pembuangan setempat (*On Site Sanitation*)**

Sistem pembuangan setempat yaitu pembuangan tinja dari jamban ke tangki septic atau cubluk, sedangkan air mandi, cuci, dan dapur di salurkan kebidang resapan atau saluran drainase. Kriteria diterapkannya sistem pembuangan setempat yaitu :

- a) Kepadatan penduduk kurang dari 200 jiwa/ha masih dimungkinkan dengan penduduk tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih.
- b) Daya tanah memenuhi syarat lahan tersedia
- c) Tersedia truk tinja untuk penyedotan

Untuk sistem pembuangan setempat (*on site system*) dipakai standar dan metode-metode sebagai berikut :

- a) Tengki septic dengan peresapan
- b) Kepadatan penduduk kurang dari 500 jiwa/ha
- c) Kecepatan daya resap tanah antara 1 cm/detik
- d) Dapat dicapai truk penyedot tinja
- e) Lahan untuk bidang resapan tersedia
- f) Cubluk

## 2) Sistem pembuangan terpusat (*Off site Sanitation*)

Pada sistem terpusat pembuangan limbah akhir pada lokasi tertentu, kemudian diolah dengan peralatan tertentu yang disebut Instalasi Pengolahan Limbah Tinja, sehingga hasil olahan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kriteria diterapkannya sistem pembuangan terpusat meliputi :

- a) Kepadatan penduduk lebih dari 500 jiwa
- b) Kepadatan penduduk antara 201-500 jiwa/ha dimungkinkan bila :
  - Air tanah sudah tercemar
  - Sebagian besar penduduk menggunakan air tanah
  - Permeabilitas tanah jelek
  - Penduduk mampu untuk membayar iuran.
  - Cocok untuk daerah yang baru dibangun dan yang peka terhadap lingkungan

## 2) Limbah Industri

Limbah yang dihasilkan oleh beberapa industri dilakukan pengelolaan terlebih dahulu oleh masing-masing pemilik industri tersebut dengan sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Adapun rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah Kota Mojokerto berdasarkan acuan pada RTR GKS Kertosusila dan kondisi Kota Mojokerto itu sendiri antara lain yaitu :

- a) Manajemen sanitasi-air limbah
- b) Pengembangan prasarana limbah padat, dengan cara :
  - Perbaikan dan perluasan fasilitas persampahan eksisting (termasuk proyek penutupan lahan TPA).
  - Program pembangunan kapasitas pembangunan (termasuk fasilitas 3R, sistem transfer sementara, inovasi teknologi untuk pengelolaan persampahan).
- c) Monitoring kapasitas untuk pengendalian pencemaran dengan cara : mencatat kualitas air limbah, khususnya untuk industri dan air sungai dan monitoring kualitas air dilaksanakan di 60 lokasi di Sungai Brantas oleh PJT1
- d) Pengadaan prasarana dan sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) komunal
- e) Pengembangan SANIMAS PLUS yang terdapat di:
  - Kelurahan Wates : KSM Sambang;
  - Kelurahan Prajuritkulon : KSM Nurjayeng;
  - Kelurahan Pulorejo : KSM Rejo Berseri dan KSM Podo Kroso;
  - Kelurahan Miji : KSM Miji Berseri;
  - Kelurahan Jagalan : KSM Jaglor Berseri;

- Kelurahan Gunung Gedangan : KSM Rejosari;
  - Kelurahan Kedundung : KSM Randegan Berseri dan KSM Balongrawe;
  - Kelurahan Sentanan : KSM Sentanan Gang Buntu;
  - Kelurahan Balongsari : KSM Balong Asri dan KSM Sanubari;
  - Kelurahan Meri : KSM Sanitri;
  - Kelurahan Blooto : KSM Lingkungan Kemas, KSM Lingkungan Blooto dan KSM Kertowongso;
  - Kelurahan Kranggan : KSM Margoratan;
  - Kelurahan Surodinawan : KSM Suka Maju dan KSM Sancen;
- f) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan dan kota yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta memiliki ketersediaan lahan di.
- g) Fasilitasi pembangunan IPAL untuk kawasan industri rumah tangga
- h) IPAL rumah sakit meliputi:
- RS. Rekso Waluyo di Jalan Majapahit
  - RS Emma di Jalan Raya Ijen
  - RS. Gatoel di Jalan Raya Wijaya
  - RS. Sayang Bunda di Jalan Gajahmada
  - RS. Kamar Medika di Jalan Empunala
  - RSUD. Dr. Wahidin Sudirohusodo di Jalan Surodinawan
  - RS. Hasanah, Jl. Cokroaminoto
- i) IPAL industri meliputi: CV. Bumi Indo di Jalan Tirta Suam No.01
- j) Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola.
- k) Pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah dan jasa melalui studi dokumen lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- l) Penerapan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, khususnya kegiatan industri.

Berdasarkan kondisi kepadatan yang ada di wilayah perencanaan saat ini sebesar 69 jiwa/ha sedangkan kepadatan yang direncanakan pada Tahun 2032 sebesar 81 jiwa/ha, maka sistem pengelolaan limbah yang dipergunakan masih menggunakan pembuangan air limbah setempat (on site system).